



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029**



H. Herman Deru
Gubernur Sumatera Selatan

H. Cik Ujang
Wakil Gubernur Sumsel

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, karena atas ridho dan berkenan-Nya serta dukungan dari berbagai pihak, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029 bisa diselesaikan.

Rencana Strategis ini disusun setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 ditetapkan, serta asumsi-asumsi dasar yang menggambarkan peran serta potensi sub sektor perkebunan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, melalui program-program dan kegiatan pembangunan perkebunan yang jelas, terukur dan berlanjut serta dapat dipertanggung jawabkan.

Demikianlah, semoga Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan Pembangunan Perkebunan di Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025-2029. Semua saran dan kritik masih kami harapkan guna penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan kedepan.

Palembang, September 2025

**Plt. KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

**HERDI APRIANSYAH, S.STP., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c
NIP. 19760425 199412 1 001**

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Grafik	vi
BAB I PENDAHULUAN	Page 1
1.1. Latar Belakang	Page 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	Page 1
1.3. Maksud dan Tujuan	Page 4
1.4. Sistematika Penulisan	Page 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN	
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	Page 7
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	Page 7
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat	
Daerah.....	Page 7
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	Page 12
2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan	
Perangkat Daerah	Page 14
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat	
Daerah	Page 21
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian	
Pelayanan	Page 22
2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian	
Kinerja	Page 22
2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung	
Jawab Perangkat Daerah	Page 22
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat	
Daerah	Page 22
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ..	Page 22
2.2.2. Isu Strategis	Page 25
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH	
KEBIJAKAN	Page 28
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	
Tahun 2025 - 2029.....	Page 28

3.2. Sasaran Rentra Perangkat Daerah Provinsi	
Tahun 2025 - 2029.....	Page 28
3.3. Strategi Perangkat Daerah Provinsi Tahun	
2025 - 2029.....	Page 30
3.4. Penahapan Pembangunan	Page 30
3.5 Penyajian Lokus	Page 31
3.6. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi	
Tahun 2025 - 2029.....	Page 31
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN	
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. .	Page 34
4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub	
Kegiatan	Page 34
4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan	
Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029 melalui	
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat	
Daerah.....	Page 53
4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan	
Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029	
melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Page 56
BAB V Penutup.....	Page 57

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Unit Pengolahan Pemasaran Bokar (UPPB) di Provinsi Sumatera Selatan	Page 10
Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	Page 13
Tabel 2.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai.....	Page 13
Tabel 2.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	Page 13
Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana yang Dimiliki.....	Page 14
Tabel 2.6. Produksi Tanaman Perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan (ton), 2020-2024.....	Page 14
Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.....	Page 19
Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.....	Page 20
Tabel 2.9. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	Page 27
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD	Page 29
Tabel 3.2. Penahapan Renstra Perangkat Daerah.....	Page 30
Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	Page 33
Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.....	Page 35
Tabel 4.2. Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	Page 42
Tabel 4.3. Rincian Komponen Belanja	Page 51
Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	Page 52
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029.....	Page 53
Tabel 4.6. Indikator Minerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2030	Page 56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan	Page 12

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Target dan Realisasi Produktivitas Karet Tahun 2020 - 2024	Page 15
Grafik 2.2. Target dan Realisasi Produktivitas Kelapa Sawit Tahun 2020 - 2024	Page 16
Grafik 2.3. Target dan Realisasi Produktivitas Kopi Tahun 2020 - 2024	Page 16
Grafik 2.4. Target dan Realisasi Produktivitas Kelapa Tahun 2020 - 2024	Page 17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (RENSTRA) perangkat daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah selama lima tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Renstra disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk memastikan keterpaduan dan keselarasan perencanaan daerah dengan visi dan misi Kepala Daerah dan kebijakan daerah.

Renstra merupakan instrumen penting dalam tata kelola pemerintah daerah yang profesional, efektif dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas. Adapun peran penting dari dokumen Renstra sebagai berikut:

1. Sebagai alat perencanaan strategis yang menjembatani antara kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan operasional perangkat daerah dalam jangka menengah, memastikan pembangunan yang konsisten dan berkesinambungan,
2. Membantu perangkat daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat.
3. Sebagai dokumen acuan dalam mengambil keputusan sehingga program pembangunan berjalan dengan efektif.
4. Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dan lembaga terkait bersinergi dalam pembangunan daerah.
5. Menjadi dasar dalam pelaporan kinerja dan akuntabilitas kepada publik sehingga pembangunan dan penggunaan sumber daya dapat lebih transparan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029, disusun dengan memperhatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
7. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 -2029;
16. Instruksi Presiden Noor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan;
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2045;
29. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029;
30. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan;
31. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
32. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, bahan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perkebunan selama lima tahun kedepan dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan perkebunan di Sumatera Selatan.

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk menjadikannya sebagai instrumen dalam menyatukan gerak langkah seluruh jajaran perkebunan, tercapainya koordinasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan sub sektor perkebunan yang terintegrasi dengan sub sektor atau sektor terkait dengan prinsip kesetaraan, keadilan dan ‘*no one left behind*’ (tidak ada seorangpun yang tertinggal) dalam mencapai tujuan pembangunan perkebunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani pekebun dan memasukkan

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Perubahan Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat daerah
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
 - 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
 - 2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja
 - 2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2. Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 - 2029
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 - 2029
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 - 2029
- 3.4. Penahapan Pembangunan
- 3.5. Penyajian Lokus
- 3.6. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 - 2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.
- 4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan, menyatakan bahwa Dinas Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 53 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, pada Dinas Perkebunan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 8 tahun 2018 tentang pembentukan, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi kerjanya Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dibantu 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu:

1. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSBTP), dan
2. UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP).

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi dinas adalah memberikan pelayanan antara lain:

Pelayanan di Bidang Kesekretariatan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas perkebunan dalam bidang umum, kepegawaian, keuangan, serta perencanaan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perkebunan ;

2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
3. Penataan organisasi dan tatalaksana;
4. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pelayanan di Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang prasarana dan sarana meliputi sarana produksi, pembiayaan dan lahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

1. Perencanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana perkebunan;
2. Perencanaan penyediaan dukungan infrastruktur perkebunan;
3. Perencanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi perkebunan;
4. Perencanaan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan;
5. Perencanaan pemberian bimbingan pembiayaan di bidang perkebunan;
6. Perencanaan pemberian fasilitasi investasi di bidang perkebunan;
7. Perencanaan pengendalian kebakaran lahan dan kebun;
8. Pengevaluasian di bidang sarana dan prasarana perkebunan;
9. Pengevaluasian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
10. Perencanaan dan inventarisasi dan fasilitasi gangguan usaha dan konflik perkebunan;
11. Pengevaluasian pemanfaatan lahan dan tata ruang; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pelayanan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pengolahan

dan pemasaran hasil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas :

- a) Perencanaan kebijakan dan program pengolahan serta pemasaran hasil perkebunan;
- b) Perencanaan pengembangan kerjasama pemasaran hasil perkebunan;
- c) Perencanaan pengembangan alat/mesin pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
- d) Perencanaan kegiatan fasilitasi standarisasi alsintan dan unit pengolahan;
- e) Perencanaan promosi dan pemasaran produk perkebunan;
- f) Perencanaan kegiatan fasilitasi penetapan harga komoditi perkebunan;
- g) Perencanaan kegiatan penyebaran informasi harga komoditi perkebunan;
- h) Perencanaan pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia pengolahan hasil perkebunan;
- i) Pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang pengolahan dan pemasaran hasil membangun kerjasama pemasaran hasil perkebunan dalam bentuk pengikutsertaan dalam pameran-pameran seperti pameran hari pangan sedunia, gelar agribisnis panas, Sriwijaya Internasional Expo, South Sumatera Expo, dan lain sebagainya. Melaksanakan pembinaan unit pengolahan dan pemasaran bokar (UPPB). Sampai tahun 2024 tercatat ada 413 UPPB yang sudah terbentuk dan telah teregistrasi dan tersebar di 15 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data UPPB secara lengkap disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Unit Pengolahan Pemasaran Bokar (UPPB) di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah UPPB (unit)
1.	Ogan Ilir	22
2.	Muara Enim	57
3.	Banyuasin	77
4.	Oku Timur	14
5.	Prabumulih	8
6.	OKI	20
7.	Lahat	10
8.	Musi Rawas	24
9.	Lubuk Linggau	4
10.	Musi Banyuasin	122
11.	PALI	16
12.	OKU	29
13.	Empat Lawang	7
14.	Muratara	2
15.	Palembang	1
J u m l a h		413

Pelayanan di Bidang Produksi

Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pembinaan produksi perkebunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Produksi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kebijakan peningkatan produksi dan perbenihan tanaman perkebunan;
- b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih tanaman perkebunan;
- c. Perencanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- d. Perencanaan program pengembangan sentra-sentra produksi perkebunan;
- e. Perencanaan pembinaan, pengawasan program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman perkebunan serta teknis budidaya perkebunan;
- f. Perencanaan pembinaan dan pengawasan perbenihan;
- g. Perencanaan pengkajian dan penerapan teknis budidaya tanaman perkebunan;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Peningkatan produktivitas perkebunan sangatlah dipengaruhi penggunaan bibit unggul serta bagaimana pelaksanaan budidaya

perkebunan yang baik. Pelayanan dalam bidang produksi memiliki peran bagaimana meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan tersebut. Peningkatan produktivitas ini dilaksanakan dengan memberikan pembinaan teknis dan bantuan benih/bibit unggul yang bersertifikat, sarana produksi serta pembinaan-pembinaan pelaksanaan budidaya perkebunan yang baik kepada petani pekebun.

Pelayanan di Bidang Kelembagaan Usaha Perkebunan dan Penyuluhan

Bidang kelembagaan usaha dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang kelembagaan usaha dan penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pembinaan, pendampingan dan pengembangan kelembagaan dan perusahaan perkebunan;
- b. Perencanaan kebijakan dan program di bidang penyuluhan;
- c. Perencanaan program pengembangan sumber daya manusia;
- d. Perencanaan pembinaan kemitraan usaha;
- e. Perencanaan penilaian usaha perkebunan besar dan penilaian fisik kebun;
- f. Pengevaluasian dan monitoring pengelolaan lingkungan hidup dan usaha perkebunan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi proses penerbitan Hak Guna Usaha perkebunan;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang ini melaksanakan pengawasan dan pembinaan perusahaan-perusahaan perkebunan agar melaksanakan usahanya sesuai dengan peraturan dan undang-undang serta melakukan penyuluhan di bidang perkebunan. Pelaksanaan rekomendasi kelayakan usaha perkebunan juga diberikan terhadap perusahaan yang akan mengajukan HGU baru atau perpanjangan. Selain itu menjaga kemitraan perkebunan agar tetap harmonis serta melaksanakan pembinaan kelembagaan petani melalui sistem kebersamaan ekonomi (SKE) dan sebagainya.

Pelayanan di Bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan

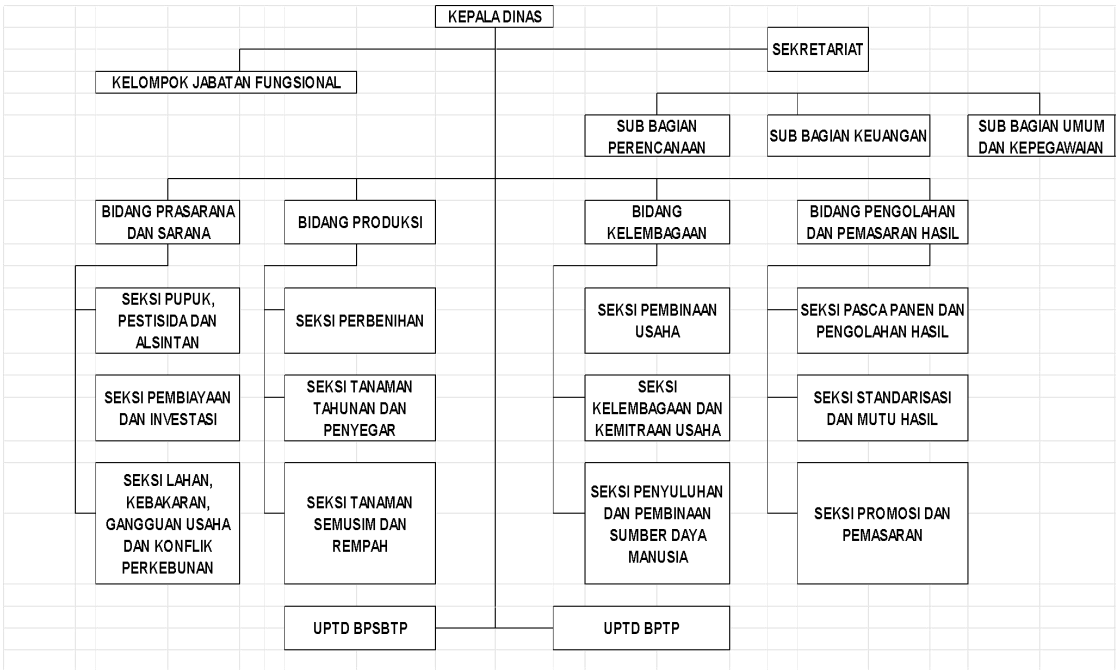
Pelayanan yang dilakukan berupa pemberian bimbingan teknis, pengawasan dan sertifikasi benih dalam rangka penyiapan benih bermutu sesuai dengan standar mutu benih yang ada.

Proses sertifikasi ini dilaksanakan untuk menghindari beredarnya benih-benih yang tidak unggul. Dengan dilaksanakannya proses sertifikasi ini diharapkan benih/bibit yang ditanam merupakan benih/bibit unggul sehingga dapat meningkatkan mutu dan produktivitas tanaman perkebunan.

Pelayanan di Bidang Proteksi Tanaman Perkebunan

Pelayanan dalam bidang proteksi perkebunan dengan melaksanakan kegiatan proteksi perlindungan tanaman perkebunan, penyediaan sarana atau bahan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan, pengamatan dan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan serta pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan juni 2025 berjumlah 56 orang dan 41 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang secara lengkap disajikan pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	PNS dan PPPK		
	SMA	20	20,61
	D3	3	3,10
	S1	50	51,55
	S2	24	24,74
	Total.....	97	-
2.	Non PNS		
	SD	1	2,08
	SMA	10	20,84
	D3	1	2,08
	S1	35	72,92
	S2	1	2,08
	Total.....	48	-

Tabel 2.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	PNS dan PPPK		
	Laki-laki	53	54,63
	Perempuan	44	45,37
	Jumlah	97	
2.	Non PNS		
	Laki-laki	24	50,00
	Perempuan	24	50,00
	Jumlah	48	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak terjadi kesenjangan komposisi jumlah pegawai laki-laki dan perempuan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.4 . Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Persentase
1.	ASN (PNS)		
	IV/d	1	1,79
	IV/b	6	10,71
	IV/a	12	21,42
	III/d	13	23,21
	III/c	7	12,5
	III/b	7	12,5
	III/a	2	3,58
	II/d	5	8,92
	II/c	2	3,58
	II/b	1	1,79
2.	ASN (PPPK)		
	Penata Muda (IX)	32	78,06
	(VII)	1	2,43
	(V)	8	19,51

Total pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 berjumlah 145 orang yang terdiri dari Pegawai PNS berjumlah 56 Orang, PPPK berjumlah 41 orang dan Pegawai Non PNS berjumlah 48 Orang.

Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana yang dimiliki

No.	Uraian	Volume	Kondisi
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5 Unit	Baik
2.	Bangunan Gedung Lainnya	10 Unit	Baik
3.	Bangunan Lainnya	4 Unit	Baik
4.	Tanah Bangunan kantor, rumah dan tempat kerja lainnya	10.158 M ²	-
5.	Tanah Perkebunan	420.000 M ²	-
6.	Kendaraan Roda 4	11 Unit	Baik
7.	Kendaraan Roda 2	49 Unit	Baik

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Selama tahun 2020 - 2024 ada beberapa penghargaan yang diterima oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perkebunan, beberapa penghargaan antara lain :

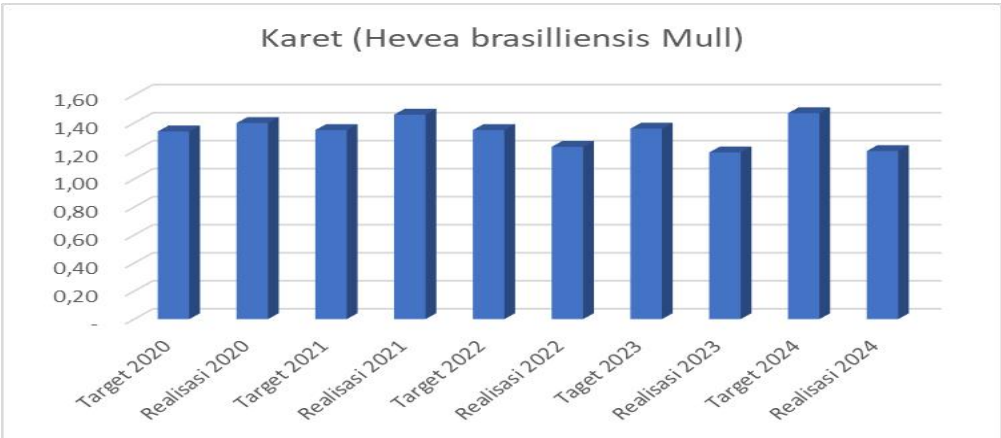
1. Penghargaan dari MURI terkait dengan Program Gerakan Sambung Pucuk Tanaman Kopi diberikan langsung oleh Customer Relation Manager MURI Indonesia. Kegiatan sambung pucuk ini telah dilakukan sebanyak 1 juta sambung pucuk di tahun 2021 dan 1 juta sambung pucuk di tahun 2022 melalui dana bantuan keuangan Gubernur Sumatera Selatan.
2. Penghargaan Anugrah Perkebunan Indonesia, kategori “Pengawasan dan Pendampingan Kebijakan Pembangunan Perkebunan“ diberikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia pada hari Perkebunan ke 65 tahun 2022.

Tabel 2.6. Produksi Tanaman Perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan (ton), 2020-2024

Komoditi	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Peningkatan Produksi (%)
Kelapa Sawit	3.323.670	3.445.027	3.354.192	3.370.527,92	3.399.995,63	0,43
Karet	1.215.233	1.246.559	1.069.561	1.003.780,13	1.008.362,07	-2,58
Kopi	163.868	211.681,48	208.043,49	206.655,70	218.667,51	3,67
Kelapa	57.732	58.121,20	61.273,50	61.563,76	61.647,20	1,40
Lainnya	93.546	210.489	322.304	178.329,19	190.152,28	25,00

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2025

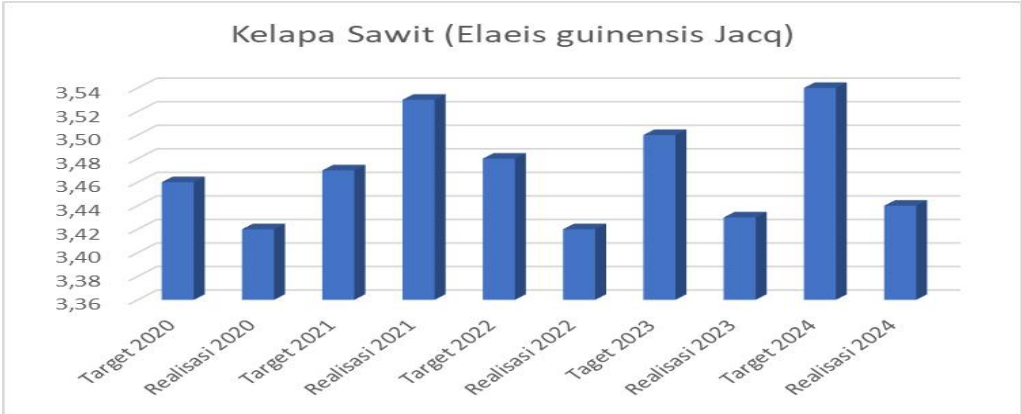
Dari tabel diatas produksi perkebunan komoditi karet mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi sebesar 1.008.362,07 ton atau sebesar 0,46% dari tahun 2023 dengan produksi sebesar 1.003.780,13 ton. Tetapi secara rata-rata selama 5 tahun mengalami penurunan produksi sebesar -2,58%. Hal ini terjadi karena terjadi penurunan luas tanaman menghasilkan dari luasan 865,862 Ha pada tahun 2020 turun menjadi 838.711 ha pada tahun 2024.



Grafik 2.1. Target dan Realisasi Produktivitas Karet Tahun 2020 – 2024

Jika dibandingkan selama tahun 2020 – 2024 terjadi fluktuasi produktivitas Karet seiring dipengaruhi harga serta kondisi iklim. Selain dipengaruhi oleh pasar internasional, harga karet pun sangat dipengaruhi oleh kualitas karet. Petani bisa memperbaiki mutu karet sehingga harga yang didapatkan bisa lebih tinggi. Mutu karet harus di jaga begitu juga dengan kadar kering karet karena akan sangat mempengaruhi harga jualnya. Salah satu usaha untuk meningkatkan harga, dengan mendorong industri hilir dalam negeri antara lain pabrik ban, aspal karet dan sebagainya akan dapat memperbaiki harga ditingkat petani sehingga tidak tergantung pada pangsa ekspor.

Data produksi perkebunan komoditi kelapa sawit pada tahun 2023 sebesar 3.370.527 ton mengalami kenaikan produksi sebesar 29.467 Ton pada tahun 2024 menjadi sebesar 3.399.995 ton. Pada tahun 2023 luas tanaman menghasilkan 982.463 Ha dan pada tahun 2024 seluas 986.194 Ha meningkat seluas 3.731 Ha, sedangkan produktivitas pada tahun 2024 sebesar 3,44 Ton/Ha/Tahun sedangkan pada tahun 2023 sebesar 3,43 Ton/Ha/Tahun.

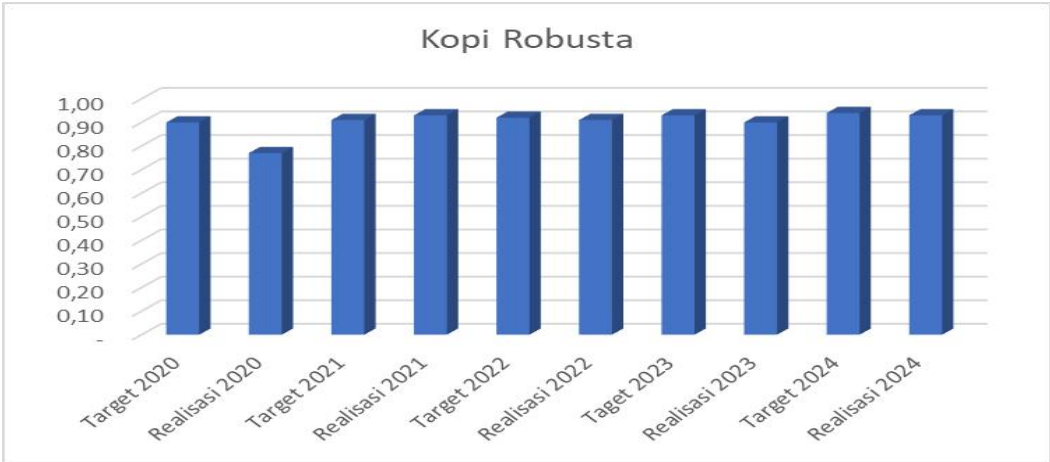


Grafik 2.2.. Target dan Realisasi Produktivitas Kelapa Sawit Tahun 2020 – 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat secara umum pencapaian terhadap target produktivitas Kelapa Sawit mengalami fluktuatif, target produktivitas dipengaruhi oleh:

- a) Kegiatan Peremajaan kelapa sawit;
- b) Harga komoditi kelapa sawit yang masih stabil walaupun mulai menurun seiring fluktuasinya harga CPO di tingkat ekspor.

Data produksi perkebunan komoditi Kopi pada tahun 2024 sebesar 218.667,51 ton dan pada tahun 2023 sebesar 206.655,7 ton, mengalami penurunan produksi sebesar 12.011 Ton, pada tahun 2024 luas tanaman menghasilkan 233.565 Ha dan pada tahun 2023 seluas 230.318, sedangkan produktivitas pada tahun 2024 sebesar 0,93 Ton/ha/tahun sedangkan pada tahun 2023 sebesar 0,90 Ton/ha/tahun.



Grafik 2.3. Target dan Realisasi Produktivitas Kopi Tahun 2020 – 2024

Dari grafik di atas produktivitas tanaman kopi di Sumatera Selatan masih jauh dari standar produksi kopi sesuai anjuran. Produktivitas kopi di Sumatera Selatan menurut data statistik perkebunan hanya 0,93 ton/Ha/Tahun sedangkan standar

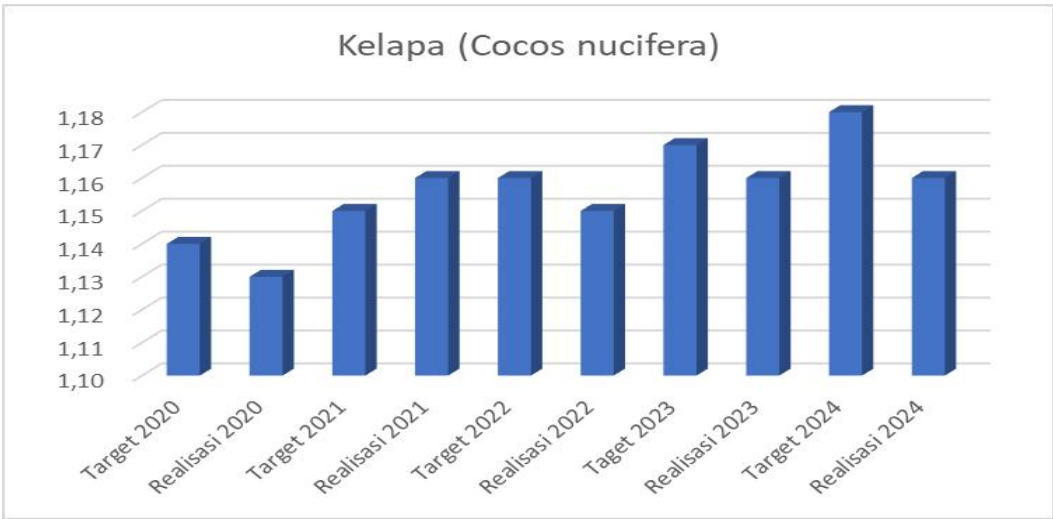
produktivitas adalah 1,3 ton/Ha/Tahun dan bahkan bisa mencapai 2 ton/Ha/Tahun.

Upaya peningkatan produksi perkebunan kopi, maka akan dilakukan :

- a) Peremajaan tanaman kopi dengan cara rejuvinasi (sambung pucuk) dengan entres yang merupakan klon unggul dengan membangun kebun sumber benih;
- b) Penggunaan bibit kopi SE (*Somatik Embriogenesis*) pada penanaman baru;
- c) Melakukan intensifikasi tanaman kopi.

Untuk meningkatkan produksi kopi, dapat dilaksanakan peremajaan kopi rakyat dengan cara sambung pucuk (rejuvinasi). Selain cepat menghasilkan, peremajaan sambung pucuk juga dapat meningkatkan produksi kopi hampir 2 (dua) kali lipat dari tanaman kopi biasa.

Data produksi komoditi Kelapa pada tahun 2024 sebesar 61.647 ton dan pada tahun 2023 sebesar 61.563 ton, peningkatan produksi rata-rata sebesar 1,4 %, pada tahun 2023 luas tanaman menghasilkan 53.109 Ha dan pada tahun 2024 seluas 53.048, sedangkan produktivitas pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 1,16 Ton/ha/tahun.



Grafik 2.4. Target dan Realisasi Produktivitas Kelapa Tahun 2020 - 2024

Dari data grafik di atas, dapat dilihat terjadi fluktuasi produktifitas tanaman Kelapa. Komoditas kelapa tidak seperti komoditas karet dan kelapa sawit yang diusahakan dalam skala perkebunan besar. Banyak tanaman kelapa yang hanya merupakan tanaman perkarangan

sehingga produksinya tidak terdata dengan baik dan tidak begitu optimal sedangkan luas areal kelapa terbesar ada di Kabupaten Banyuasin seluas 7.494 Ha. Untuk meningkatkan produksi kelapa perlu terus dilakukan dengan memberikan bantuan bibit kelapa yang unggul serta pengalokasian pupuk bersubsidi yang lebih besar untuk perawatan/pemeliharaan pada komoditi kelapa tersebut.

Selain luas areal dan produksi komoditi perkebunan, kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari data jumlah usaha perkebunan. Pada tahun 2025 data jumlah usaha perkebunan yang di himpun melalui aplikasi SIPARIBUN berjumlah 203 usaha Perkebunan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berupa pengawasan secara rutin setiap tahunnya terus dilaksanakan seperti Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar, melakukan Pembinaan Kemitraan Usaha Perkebunan, Monitoring dan evaluasi Perusahaan Besar, Pendataan perkebunan, Pembinaan Amdal Perkebunan dan Pembinaan dan Pengawasan Revitalisasi Perkebunan. Kegiatan pengawasan unit usaha perkebunan juga dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kunjungan langsung ke pabrik dan perusahaan perkebunan.

Pendidikan dan pelatihan terhadap SDM perkebunan perlu menjadi perhatian, karena pelatihan ini bertujuan agar SDM perkebunan memiliki keahlian dan keterampilan baik dalam teknik budidaya maupun kelembagaan usaha perkebunan. Dengan semakin baiknya kualitas SDM perkebunan diharapkan memiliki nilai tawar yang baik sehingga harga ditingkat petani menjadi lebih tinggi dan kesejahteraan petani menjadi meningkat. Disamping itu, meningkatnya kemampuan petani dalam melakukan budidaya perkebunan sesuai anjuran sangatlah diperlukan terutama bagaimana menanggulangi hama dan penyakit sehingga dapat meningkatkan umur produktif tanaman.

Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan
Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Peningkatan Luas Tanaman Menghasilkan (%)	-	-	-	-	0,17	0,18	0,20	0,39	-	0,38	0,22	0,66	0,16	-	223,5	122,2	303	41,00
2	Jumlah luas areal perkebunan (Ha)	-	-	-	2.840.000	2.845.000	2.850.000	2.855.000	2.960.000	2.927.809	2.950.636	2.953.493	2.859.486,07	2.861.226	103,1	103,7	103,6	104,18	97,00
3	Produktivitas Karet (Ton/Ha/Thn)	-	-	-	1,34	1,35	1,35	1,36	1,47	1,40	1,46	1,47	1,19	1,17	104,5	108,1	108,9	87,50	79,59
4	Produktivitas Kelapa Sawit (Ton/Ha/Thn)	-	-	-	3,46	3,47	3,48	3,50	3,54	3,42	3,53	3,84	3,43	3,43	98,8	101,7	110,3	98,00	96,89
5	Produktivitas Kopi (Ton/Ha/Thn)	-	-	-	0,90	0,78	0,79	0,80	0,94	0,77	0,93	0,91	0,89	0,89	85,6	119,2	115,2	111,25	94,68
6	Produktivitas Kelapa (Ton/Ha/Thn)	-	-	-	1,14	1,15	1,16	1,17	1,18	1,13	1,17	1,16	1,16	1,15	99,1	101,7	100,0	99,15	97,46
7	Jumlah Produksi Pertahun (Ton)	-	-	-	-	-	4.590.000	4.600.000	-	-	-	5.015.373	4.820.856,70	-	-	-	109,27	106,67	-
8	Jumlah Benih Unggul yg beredar (Benih)	-	-	-	34.000.000	34.500.000	34.600.000	35.000.000	17.000.000	21.265.758	14.589.520	16.654.222	18.420.044	19.076.378	62,5	42,3	48,1	52,63	112,2
9	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perkebunan (%)	-	-	-	5	5	-	-	-	6,74	6,74	-	-	-	134,8	134,8	-	-	-
10	Persentase prasarana perkebunan yang dimanfaatkan (%)	-	-	-	-	66	66	83	13,70	-	66	66	100	20	-	100,0	100,0	120	146
11	Meningkatnya pengawasan perusahaan perkebunan (unit)	-	-	-	-	230	230	240	316	-	316	316	316	316	-	137,4	137,4	131,70	100
12	Persentase petani yang tergabung dalam pengolahan pemasaran bersama (%)	-	-	-	6,30	6,50	6,70	7,00	24,10	17,72	18,63	24,02	10,50	26,6	281,3	286,6	358,5	150	110,4
13	Jumlah Usaha Perkebunan yang terawasi (unit)	-	-	-	230	230	-	-	-	312	276	-	-	-	135,7	120,0	-	-	-
14	Meningkatnya Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan (kelompok)	-	-	-	-	-	40	40	92	-	-	91	71	122	-	-	227,5	177,50	132,6
15	Nilai Tukar Petani Perkebunan	-	-	-	-	-	96	98	115,1	-	-	115,07	105,06	130,35	-	-	119,86	107,21	113,3
16	Luas areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan gangguan usaha (Ha)	-	-	-	-	-	2.950	3.000	650	-	-	550	500	32.767	-	-	18,6	16,70	>100
17	Jumlah Serangan Organisme Pengganggu Tanaman yang terkendali (Ha)	-	-	-	1.500	1.750	-	-	-	350	300	-	-	-	23,3	17,1	-	-	-
18	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	-	-	-	90	90	90	90	100	100	100	100	100	100	111,1	111,1	111,1	111,1	100

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan
Provinsi Sumatera Selatan

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20	21	13	14	15	16
	Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)	12.683.358.000					12.682.328.000					99,99	-	-	-	-	-	-
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.453.887.900	-	-	-	-	1.953.807.736	-	-	-	-	79,62	-	-	-	-	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	140.000.000	-	-	-	-	34.645.770	-	-	-	-	24,75	-	-	-	-	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100.000.000	-	-	-	-	87.450.000	-	-	-	-	87,45	-	-	-	-	-	-
4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000	-	-	-	-	61.714.713	-	-	-	-	61,71	-	-	-	-	-	-
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	85.000.000	-	-	-	-	53.961.281	-	-	-	-	63,48	-	-	-	-	-	-
7	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan	289.000.000	-	-	-	-	131.489.864	-	-	-	-	45,50	-	-	-	-	-	-
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	85.000.000	-	-	-	-	40.600.000	-	-	-	-	47,76	-	-	-	-	-	-
9	Program Pengembangan Perbenihan Perkebunan	100.000.000	-	-	-	-	65.560.000	-	-	-	-	65,56	-	-	-	-	-	-
10	Program Proteksi Tanaman Perkebunan	1.645.022.702	-	-	-	-	115.519.000	-	-	-	-	7,02	-	-	-	-	-	-
11	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	1.953.323.700	-	-	-	-	1.333.392.500	-	-	-	-	68,26	-	-	-	-	-	-
12	Program Pengembangan Kelembagaan Usaha Perkebunan	41.912.100	-	-	-	-	23.381.000	-	-	-	-	55,79	-	-	-	-	-	-
13	Program Pengembangan Sentra-sentra Produksi Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	12.984.377.000	14.587.236.580	14.142.641.200	13.116.925.563	-	12.357.519.753	12.772.531.707	13.109.263.475	12.160.556.072	-	95,17	87,56	92,69	92,71	0,68	-071
15	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	-	1.698.186.200	1.694.800.000	3.081.250.000	59.325.355	-	1.535.266.507	1.620.679.608	2.996.629.653	58.825.355	-	90,41	95,63	97,25	99,16	5,49	3,14
16	Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian	-	897.240.000	85.000.000	3.379.420.000	-	-	888.369.677	84.915.000	3.312.674.700	-	-	99,01	99,90	98,02	-	>100	-0,49
17	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-	170.000.000	290.000.000	315.000.000	-	-	164.689.600	252.417.899	303.703.845	-	-	96,88	87,04	96,41	-	26,40	0,31
18	Program Perizinan Usaha Pertanian	-	70.000.000	75.000.000	100.000.000	-	-	61.835.000	70.742.649	50.480.000	-	-	88,34	94,32	50,48	-	13,49	-19,85
19	Program Penyuluhan Pertanian	-	930.000.000	5.484.641.981	5.980.501.682	20.674.065.000	-	5.571.000	5.263.561.020	5.957.094.930	7.494.082.350	-	0,60	95,97	99,61	36,25	>100	>100
	Total Anggaran	21.676.504.402	16.749.803.200	22.216.678.561	26.998.812.882	33.850.315.918	16.583.849.864	15.013.251.537	20.064.847.883	25.729.846.603	19.713.463.777	76,51	89,63	90,31	95,30	58,24	-	-

Jika dilihat dari tabel di atas, rata-rata pertumbuhan anggaran cenderung meningkat dari tahun 2020 sampai dengan 2024, di tahun 2020 alokasi anggaran sebesar Rp. 21.676.504.402,-. dan di tahun 2024, alokasi anggaran meningkat menjadi Rp. 33.850.315.918,- namun jika dilihat dari rasio penyerapan anggaran rata-rata mengalami fluktuasi. Hal ini terjadi karena pada beberapa program kegiatan, tingkat serapannya rendah sehingga ikut mempengaruhi pelaksanaan dalam pencapaian target kinerja tahunan. Seperti di tahun 2024, terdapat kegiatan bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang sebagian besar kegiatannya belum terlaksana karena ruang lingkup kegiatan yang sama dengan Kab/ Kota.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Data statistik perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah petani yang berusaha di sektor perkebunan terdata sebanyak 1.217.712 kepala keluarga, baik itu yang tergabung dalam kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan). maupun perorangan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perkebunan terus berupaya untuk memberikan perhatian kepada petani pekebun terutama yang tergabung dalam kelompok tani/kelompok wanita tani dan gabungan kelompok tani, dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan anggota kelompok tani.

Unit usaha perkebunan juga tidak lepas dari perhatian Dinas perkebunan. Pengawasan rutin terus dilakukan seperti pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 313 unit usaha perkebunan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu juga pengawasan dan pembinaan secara rutin juga dilakukan kepada para produsen benih/bibit tanaman perkebunan seperti karet dan kelapa sawit. Pengawasan ini meliputi pengawasan peredaran benih/bibit, pengawasan mutu benih/bibit yang ditandai dengan sertifikat pada benih/bibit tersebut.

Dalam memberikan pelayanan, Dinas Perkebunan bekerja sama dengan mitra yang berada di kecamatan dalam hal perlindungan kepada masyarakat pekebun, deteksi dan pencegahan dini timbulnya konflik di lahan perkebunan, sosialisasi dan pencegahan kebakaran lahan perkebunan.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan layanan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, bermitra dengan:

1. Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Perkebunan)
2. Dinas yang membidangi sub sektor perkebunan kabupaten/kota
3. Perangkat Daerah terkait
4. Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian
5. Lembaga Swadaya Masyarakat

2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja

Belum ada peran dan kontribusi BUMD dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan koordinasi antar wilayah untuk mencapai tujuan pembangunan bersama. Melalui kerjasama, sumber daya dan potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan ekonomi serta stabilitas sosial dan lingkungan. Kerjasama daerah juga akan memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kerjasama yang terjalin adalah:

- a) Kerjasama dengan lembaga non pemerintah, yaitu kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan *The International Center for Research In Agroforestry* (ICRAF).

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada dasarnya pelaksanaan pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan serta mendukung visi dan misi RPJMD.

Namun demikian masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan bidang perkebunan. Adapun permasalahan yang masih terus dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan pelayanan.

Dalam pelaksanaan pelayanan, SDM yang dimiliki masih terbatas baik dari kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu penambahan pegawai dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk seluruh pegawai dalam meningkatkan kompetensi sesuai dengan kualifikasi masing-masing.

2. Mutu produk yang dihasilkan pada perkebunan (rakyat) pada umumnya masih rendah (asalan), sehingga menyebabkan harga jual produk yang diterima petani juga rendah.

Untuk mendapatkan mutu produk yang baik, produsen harus menguasai cara pengolahan sesuai SNI dan standarisasi ekspor. Untuk semua hasil produk perkebunan yang akan di ekspor diberlakukan standar ISO 9000, ISO 14.000. termasuk kadar residu terhadap produk-produk perkebunan akibat pengelolaan pasca panen yang belum memenuhi standar serta penggunaan bahan-bahan kimia yang tinggi.

3. Iklim berusaha kurang kondusif

Iklim usaha yang kurang kondusif ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah yang tidak populer, misalnya pemberlakuan pajak ekspor CPO, selain itu faktor keamanan yang kurang mendukung, baik gejolak ekonomi (penjarahan kebun) maupun gejolak politik.

Iklim usaha yang kurang kondusif ini juga termasuk system perpajakan, kepastian hukum terhadap sengketa lahan dan Peraturan Daerah yang belum optimal mendukung iklim investasi yang mengakibatkan tingginya resiko investasi.

4. Rendahnya produktivitas dan mutu hasil

Kondisi produktivitas hasil perkebunan pada umumnya masih rendah terutama perkebunan rakyat. Rendahnya produktivitas hasil karena penerapan teknologi maju di petani yang belum optimal. Hal ini dikarenakan karena keterbatasan modal dan pengetahuan, sebagian besar petani belum menggunakan benih/bibit unggul, serta rendahnya penggunaan pupuk dan obat-obatan bahkan kadang-kadang sarana produksi ini langka dipasaran, serta makin banyaknya tanaman yang sudah masuk ketegari tanaman tua/rusak sehingga mengakibatkan produksi menurun. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan produktivitas perkebunan rakyat.

Akselerasi produktivitas komoditas perkebunan sangat terkait kepada pola pengelolaan teknis budidaya, mulai dari penyiapan lahan, penggunaan

bibit/benih unggul, pemeliharaan, pengendalian hama penyakit, panen dan penanganan pasca panen.

Dari produktivitas komoditi perkebunan pun masih banyak yang bisa ditingkatkan terutama untuk komoditas karet dan kopi. Peningkatan produktivitas ini dapat dilaksanakan dengan melakukan peremajaan tanaman yang sudah tua baik itu melalui pergantian tanaman yang tua dengan benih baru yang bersertifikat maupun dengan melaksanakan rejuvinasi (sambung pucuk) untuk tanaman kopi. Dengan menerapkan teknis penyadapan yang baik dapat memperpanjang usia produktif sehingga produktivitas per siklus hidup karet meningkat.

Mutu hasil perkebunan sebagaimana produktivitas juga rendah terutama hasil perkebunan rakyat, karena produksinya masih produk asalan, sebagai contoh petani belum mengolah bahan olah karet (bokar) sesuai teknologi yang dianjurkan, buah kopi dipanen masih bercampur buah hijau atau melaksanakan penjemuran di atas tempat yang tidak layak.

5. Rendahnya kualitas SDM dan Kelembagaan petani

Masalah yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan selama ini adalah masih rendahnya tingkat produktivitas dan mutu hasil, hal ini disebabkan belum maksimalnya pengelolaan usaha dalam penerapan teknologi, penanganan panen dan pasca panen ini akibat rendahnya kualitas SDM petani pekebun. Di samping itu belum berperan dan berkembangnya kelembagaan di tingkat petani, mulai dari kelompok tani, gabungan kelompok tani maupun koperasi primer di tingkat petani sehingga posisi rebut tawar (*bargaining position*) petani hanya sebagai “*Price taker*” bukan sebagai “*Price Decider*” dan bergerak hanya pada on farm dan margin hanya diperoleh dari penjualan produk primer.

Di samping masalah rendahnya kualitas SDM petani, kemampuan petugas lapangan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada petani masih terbatas, sehingga masih memerlukan peningkatan pendidikan dan pelatihan serta menambah wawasan berpikir bagi para petugas penyuluh.

6. Kurang tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana perkebunan

Aktivitas perkebunan pada umumnya terdapat pada wilayah – wilayah terpencil, dengan kondisi prasarana perhubungan darat seperti jalan dan

jembatan yang belum memadai, yang diperlukan untuk kelancaran sarana transportasi baik untuk angkutan saprodi maupun pengangkutan hasil produksi perkebunan dari dan ke sentra produksi perkebunan. Disamping itu perlu adanya dukungan prasarana perhubungan laut seperti pelabuhan ekspor yang memadai untuk penambahan kapasitas bongkar muat dan angkutan.

Keadaan perekonomian yang belum kondusif dengan harga sarana produksi baik pupuk, obat – obatan maupun bibit unggul semakin meningkat sehingga tidak terjangkau oleh daya beli petani. Di samping harga saprodi yang tinggi, pada tempat-tempat tertentu saprodi tidak tersedia atau langka, kondisi ini merupakan kendala bagi petani untuk petani meningkatkan produktivitasnya.

7. Kebakaran Lahan Perkebunan

Kebakaran lahan perkebunan merupakan salah satu permasalahan krusial yang sering dihadapi. Kebakaran lahan dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman, sehingga mengancam keberlanjutan produksi, merusak ekosistem dan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat.

Kebakaran lahan juga dapat memperburuk perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca selama proses kebakaran. Untuk itu penanganan kebakaran lahan khususnya di lahan perkebunan dapat menjadi prioritas utama dalam pengelolaan perkebunan berkelanjutan, melalui pencegahan, deteksi dini, serta koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat pekebun.

2.2.2. Isu Strategis

a. Kampanye negatif produk perkebunan Indonesia

Ada isu – isu negatif dari luar negeri terhadap penggunaan produk hasil negara Indonesia dan ASEAN, misalnya: Penggunaan pestisida dan bahan kimia dalam perkebunan kelapa sawit dapat mencemari sumber air dan tanah, merusak ekosistem dan kesehatan manusia..

Isu-isu negatif yang disebarkan sengaja untuk menekan pengembangan perkebunan di Indonesia, terutama untuk komoditas yang bersaing dipasar global seperti Kelapa Sawit. Kampanye negatif ini apabila tidak ditindaklanjuti akan mengakibatkan penurunan harga komoditas dan permintaan ekspor dari negara-negara lain.

b. Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan

Konflik lahan sering terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Konflik ini muncul karena lahan yang sejak lama dikelola masyarakat digarap oleh perusahaan tanpa ganti rugi. Konflik ini menunjukkan ketidakadilan dalam tata kelola lahan antara perusahaan dan masyarakat, sehingga memerlukan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

c. Kebakaran Lahan Perkebunan

Kebakaran lahan di Sumatera Selatan menjadi masalah tahunan yang berdampak besar pada lingkungan dan sektor perkebunan. Jutaan hektar lahan di Sumatera Selatan dikuasai korporasi HTI, perkebunan kelapa sawit dan perkebunan rakyat yang terkait erat dengan kejadian kebakaran. Perlu dilakukan tindakan mitigasi dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan lahan, karena kebakaran lahan tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi di sektor perkebunan tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan meningkatkan emisi karbon yang berkontribusi pada perubahan iklim global.

d. Nilai Tambah Hasil Perkebunan

Nilai tambah produk perkebunan masih rendah dikarenakan sebagian besar hasil perkebunan dijual dalam bentuk bahan mentah atau hasil primer tanpa pengolahan lanjutan, sehingga membatasi potensi peningkatan pendapatan petani pekebun. Perlunya upaya diversifikasi produk perkebunan secara berkelanjutan sehingga nantinya mampu meningkatkan pendapatan petani.

e. Akses Petani Pekebun terhadap Sumber Daya

Akses petani pekebun terhadap modal, teknologi pertanian dan akses lahan masih terbatas sehingga membatasi kemampuan mereka dalam pengembangan usaha perkebunan. Akses terhadap sumber daya ini perlu ditingkatkan bagi semua petani pekebun termasuk juga keterlibatan perempuan di semua tingkatan. Meningkatkan partisipasi perempuan di semua tingkatan melalui pelatihan, akses teknologi dan pemberdayaan ekonomi untuk memperkuat posisi mereka dalam rantai nilai perkebunan.

Tabel 2.9. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Perkebunan	<i>Rendahnya produktivitas dan mutu hasil</i>	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal	Krisis Sumber Daya Alam	Dampak Hilirisasi mulai terlihat Positif Bagi Perekonomian Indonesia	Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan Belum	Nilai Tambah Hasil Perkebunan
	Mutu produk yang dihasilkan pada perkebunan (rakyat) pada umumnya masih rendah (asalan), sehingga		Cuaca Ektrim	Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global	Ketergantungan Komoditas Primer dan Rendahnya Nilai Tambah	Kampanye negatif produk perkebunan indonesia
					Diversifikasi dan Hilirisasi Industri belum Optimal	
	Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan pelayanan PD	Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting	Krisis Sumber Daya Alam	Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global	Disparitas Kualitas Sumber Daya Manusia	Akses Petani Perkebunan terhadap Sumber Daya
	<i>Rendahnya kualitas SDM dan Kelembagaan petani</i>				Tingkat Kemiskinan yang Relatif Masih Tinggi	
	<i>Kurang tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana perkebunan</i>					
	Iklm berusaha kurang kondusif	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal	Polarisasi Sosial	Sikronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral	Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah	Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan
				Transisi Energi untuk Mendorong Pemerataan	Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah	
	Kebakaran Lahan Perkebunan	Belum Optimalnya Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Cuaca Ektrim	Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global	Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor	Kebakaran Lahan Perkebunan
			<i>Biodiversity Loss dan Gangguan Ekosistem</i>			
			Misinformasi dan Disinformasi			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 dan Visi Sumsel 2025-2029 **“Sumsel Maju Terus untuk Semua”** dengan Misi 2 yaitu:

Misi 2 : Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasisi sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

serta program-program yang dituangkan untuk mendukung pencapaian misi ini yang selaras dengan sub sektor perkebunan, yaitu:

1. Meningkatkan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan melalui akses ketersediaan sarana produksi.
2. Medorong program replanting perkebunan sawit dan karet rakyat.
3. Melanjutkan program sambung pucuk kopi guna peningkatan produksi.

maka Dinas Perkebunan menyusun Tujuan pembangunan sub sektor perkebunan untuk mendukung pencapaian apa yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Tujuan pembangunan sub sektor perkebunan yang telah ditetapkan adalah meningkatnya kesejahteraan petani sub sektor perkebunan, dengan indikator pencapaiannya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Sasaran pembangunan sub sektor perkebunan adalah meningkatnya produksi tanaman unggulan perkebunan, yang di dalamnya mencakup peningkatan produktivitas dan mutu hasil komoditas perkebunan secara berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan beserta indikator kinerjanya, akan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rentra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan daerah (masuk di misi ke 2 yaitu: Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Berkelanjutan dalam Rangka Ekonomi	1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani Sub Sektor Perkebunan		1. Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTP)	%	130,35	116	118	120	122	124	126	
				1.1 Persentase peningkatan produksi Karet	%	0,46	0,109	0,110	0,111	0,112	0,113	0,114	
					Ton	1.008.362,07	1.009.461,18	1.010.571,59	1.011.693,33	1.012.826,42	1.013.970,92	1.015.126,84	
				1.2 Persentase peningkatan produksi Kelapa Sawit	%	0,87	0,445	0,447	0,449	0,451	0,453	0,455	
					Ton	3.399.995,63	3.415.125,61	3.430.391,22	3.445.793,68	3.461.334,21	3.477.014,05	3.492.834,47	
				1.3 Persentase peningkatan produksi Kopi	%	5,12	3,713	3,715	3,718	3,720	3,725	3,730	
					Ton	218667,51	226.786,630	235.211,760	243.956,930	253.032,130	262.457,580	272.247,240	
				1.4 Persentase peningkatan produksi Kelapa	%	0,14	1,441	1,445	1,447	1,449	1,451	1,455	
					Ton	61647,2	62.535,540	63.439,170	64.357,140	65.289,670	66.237,030	67.200,780	
			1.2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	1.1 Evaluasi Aktif dari SAKIP	Nilai atau skor	80,72	80,75	80,80	80,85	80,90	80,95	81,00	

3.3. Strategi Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Strategis Pembangunan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatar kedepan atau periode 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- o Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di sektor perkebunan dengan memberikan akses yang adil dan setara terhadap teknologi, pelatihan dan pendidikan bidang perkebunan.
- o Melakukan Optimalisasi Lahan-lahan perkebunan yang kurang produktif untuk lebih meningkatkan produksi dan produtivitas.
- o Pembangunan perkebunan diarahkan pada perluasan areal perkebunan sesuai dengan potensi pengembangan dalam RTRW dan topograpi kewilayahan.
- o Peningkatan penggunaan sarana perkebunan.
- o Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan bencana di sub sektor perkebunan.
- o Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perkebunan
- o Meningkatkan penanganan panen di sektor perkebunan sesuai dengan anjuran dan standar penanganan.

3.4. Penahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan sub sektor perkebunan merupakan rangkaian proses yang sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan perkebunan secara berkelanjutan dan pada akhirnya mampu mensejahterakan petani serta pelaku usaha.

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Penyediaan sarana dan prasarana pertanian tanaman perkebunan sebagai usaha peningkatan produksi komoditi perkebunan	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian tanaman perkebunan sebagai usaha peningkatan produksi komoditi perkebunan	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian tanaman perkebunan sebagai usaha peningkatan produksi komoditi perkebunan	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian tanaman perkebunan sebagai usaha peningkatan produksi komoditi perkebunan	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian tanaman perkebunan sebagai usaha peningkatan produksi komoditi perkebunan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Gerakan Sumsel Mandiri Pangan	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan
Peningkatan Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh (alokasi petugas Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan /TP4)	Peningkatan Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh (alokasi petugas Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan /TP4)	Peningkatan Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh (alokasi petugas Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan /TP4)	Peningkatan Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh (alokasi petugas Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan /TP4)	Peningkatan Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh (alokasi petugas Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan /TP4)
Adaptasi terhadap perubahan iklim	Adaptasi terhadap perubahan iklim	Adaptasi terhadap perubahan iklim	Adaptasi terhadap perubahan iklim	Adaptasi terhadap perubahan iklim
Pembinaan, penilaian usaha, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha perkebunan	Pembinaan, penilaian usaha, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha perkebunan	Pembinaan, penilaian usaha, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha perkebunan	Pembinaan, penilaian usaha, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha perkebunan	Pembinaan, penilaian usaha, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha perkebunan

3.5. Penyajian Lokus

Sumatera Selatan terdiri atas 17 kabupaten/kota yang mempunyai potensi untuk pengembangan komoditas perkebunan. Penetapan lokus dapat dilakukan berdasarkan wilayah administrasi agar memudahkan dalam koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perkebunan, serta memastikan bahwa kegiatan pembangunan perkebunan sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan yang berlaku demi menjaga keberlanjutan sumber daya alam

Penetapan lokus pembangunan perkebunan juga dapat dilakukan dengan pendekatan berbasis kawasan yang mempertimbangkan potensi komoditas, kondisi sumber daya dan strategi pengembangan wilayah

3.6.Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Arah kebijakan sub sektor perkebunan lima tahun ke depan diambil dari strategi yang ditetapkan adalah :

- Mendorong pelaksanaan rehabilitasi tanaman-tanaman perkebunan yang kurang produktif.
- Melakukan diversifikasi tanaman perkebunan dengan tanaman lainnya untuk meningkatkan pendapatan petani perkebunan.
- Mendorong pengembangan lahan-lahan perkebunan sesuai dengan potensi dan kawasan sentra-sentra komoditi unggulan.
- Mendorong peningkatan investasi di sektor perkebunan dalam memanfaatkan pengembangan serta penumbuhan industri hilir.
- Mengembangkan perbenihan dan fasilitasi sertifikasi benih/bibit untuk menjamin kualitas benih/bibit yang beredar dimasyarakat.
- Meningkatkan ketersediaan sarana air mendukung peningkatan produksi.
- Meningkatkan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan perlindungan usaha perkebunan yang berwawasan lingkungan.
- Meningkatkan pengawasan, pencegahan dan penanganan kebakaran lahan perkebunan dan meminimalisir gangguan usaha dan konflik usaha perkebunan.
- Terus melakukan peningkatan ketersediaan alat dan mesin perkebunan agar budidaya perkebunan lebih efektif dan efisien diwilayah pengembangan perkebunan.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan perkebunan yang unggul dan memiliki daya saing.
- Mendorong peningkatan sitem pengolahan hasil perkebunan dan sistem budidaya yang baik serta sesuai dengan anjuran.

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	2	3	4	5
1.	UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Meningkatkan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan melalui akses ketersediaan sarana produksi.	Melakukan diversifikasi tanaman perkebunan dengan tanaman lainnya untuk meningkatkan pendapatan petani perkebunan	Mendukung Misi 2
			Mendorong pengembangan lahan-lahan perkebunan sesuai dengan potensi dan kawasan sentra-sentra komoditi unggulan	
			Mengembangkan perbenihan dan fasilitasi sertifikasi benih/bibit untuk menjamin kualitas benih/bibit yang beredar dimasyarakat	
			Meningkatkan ketersediaan sarana air mendukung peningkatan produksi	
			Meningkatkan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Perlindungan Usaha Perkebunan yang berwawasan lingkungan	
			Terus melakukan peningkatan ketersediaan Alat dan Mesin Perkebunan agar budidaya perkebunan lebih efektif dan efisien diwilayah pengembangan perkebunan	
2.	UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Menjaga dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menciptakan lapangan kerja.	Mendorong peningkatan investasi di sektor perkebunan dalam memanfaatkan pengembangan serta penumbuhan industri hilir	Mendukung Misi 2
			Meningkatkan pengawasan, pencegahan dan penanganan kebakaran lahan perkebunan dan meminimalisir gangguan usaha dan konflik usaha perkebunan	
3.	UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Mendorong program replanting perkebunan sawit dan karet rakyat.	Mendorong pelaksanaan rehabilitasi tanaman-tanaman perkebunan yang kurang produktif.	Mendukung Misi 2
4.	UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas tenaga penyuluh pertanian di setiap desa untuk mendampingi petani dalam mengembangkan teknik dan teknologi pertanian.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan perkebunan yang unggul dan memiliki daya saing	Mendukung Misi 2
5.	UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Mendorong hilirisasi produk-produk unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar regional dan global.	Mendorong peningkatan sitem pengolahan hasil perkebunan dan sistem budidaya yang baik serta sesuai dengan anjuran	Mendukung Misi 2

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Pembangunan perkebunan lebih dititikberatkan pada pengembangan kawasan agribisnis perkebunan dan peningkatan kualitas produk hasil untuk mendukung pengembangan industri hilir yang melibatkan peran langsung seluruh *stake holders* dalam setiap tahapan kegiatan. Secara garis besar Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2025-2029 telah menyusun 1 Program rutin dan 5 Program pilihan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penyediaan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

Adapun rincian Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 akan ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Tujuan		Sasaran	Outcome	Output	Indikator		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan daerah (masuk di misi ke 2)	1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Sub Sektor Perkebunan	1.1	Meningkatnya produksi tanaman unggulan perkebunan	-	1.	Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTP)		
							1.1	Persentase peningkatan produksi Karet (%)		
							1.2	Persentase peningkatan produksi Kelapa Sawit (%)		
							1.3	Persentase peningkatan produksi Kopi (%)		
							1.4	Persentase peningkatan produksi Kelapa (%)		
							1.9	Evaluasi aktif dari SAKIP		
		1.2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja	1.1.1	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		1.1.1	Luas Pengembangan Komoditi Perkebunan (ha)	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	
							1.1.1.1	Meningkatnya pengawasan peredaran sarana pendukung pertanian	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
									Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	
									Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
					1.1.1.2	Meningkatnya pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman	1.1.1.2	Jumlah Dokumen Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
									Sub kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	
									Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	
									Sub Kegiatan Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
					1.1.1.3	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme		Periode pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	
									Sub kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	
				1.1.2	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		1.1.2	Persentase realisasi pembangunan prasarana perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian	
									1.1.2.1	Meningkatnya penataan prasarana pertanian
Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya										

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1.1.3 Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan	1.1.3.1 Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan		Sub kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya	
						1.1.3 Luas Areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan Gangguan Usaha	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
						1.1.3.1 Jumlah pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan (ha)	Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi Sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
							Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
							Sub Kegiatan Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	
				1.1.4 Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	1.1.4.1 Terlaksananya penerbitan Rekomtek usaha	1.1.4 Persentase Izin Usaha yang diawasi dan dibina	Program Perizinan Usaha Pertanian	
						1.1.4.1 Jumlah Dokumen Rekomtek usaha perkebunan	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7		8	9
					perkebunan yang kegiatan usahanya lintas kabupaten/kota			Sub kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	
					1.1.5 Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	1.1.5	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian	
						1.1.5.1	Jumlah cakupan binaan kelompok tani (kelompok)	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
								Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	
						1.1.5.2	Jumlah kelembagaan pekebun yang terbentuk (kelompok)	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Pertanian Berbasis Kawasan	
								Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	
						1.1.6.1	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
								Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
								Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
								Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Sub kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
							Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
							Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah	
							Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
							Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
							Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
							Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
							Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
							Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
							Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
							Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
							Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
							Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan		Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	
							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
							Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
							Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	
							Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
							Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	

Tabel 4.2. Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DINAS PERKEBUNAN				30.504.539.564		30.504.539.564	-	39.431.511.798	-	41.431.511.798	-	43.431.511.798	-	45.431.511.798		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	15.877.075.884	100%	21.909.539.564	100%	25.671.511.798	100%	27.571.511.798	100%	29.571.511.798	100%	31.496.511.798		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan dan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 laporan dan dokumen	6 laporan dan dokumen	130.500.000	6 laporan dan dokumen	137.347.688	8 Laporan dan dokumen	440.000.000	8 Laporan dan dokumen	440.000.000	8 Laporan dan dokumen	445.000.000	8 Laporan dan dokume n	450.000.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok.	5 Dok.	115.000.000	5 Dok.	67.347.688	5 Dok.	250.000.000	5 Dok.	250.000.000	5 Dok.	250.000.000	5 Dok.	250.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	1 Lap.	15.500.000	1 Lap.	20.000.000	2 Lap.	40.000.000	2 Lap.	40.000.000	2 Lap.	45.000.000	2 Lap.	50.000.000		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah data statistik sektoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah	-	-	-	-	45.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000		
Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	5.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000		

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	periode pelaksanaan administrasi perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	12.148.516.000	1 tahun	16.998.385.000	1 tahun	18.766.511.798	1 tahun	20.611.511.798	1 tahun	22.636.511.798	1 tahun	24.856.511.798		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	792 org/bln	792 org/bln	11.818.516.000	792 org/bln	16.748.385.000	792 org/bln	18.416.511.798	792 org/bln	20.261.511.798	792 org/bln	22.286.511.798	792 org/bln	24.506.511.798		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	5 dok.	5 Dok.	330.000.000	6 Dok.	250.000.000	6 Dok.	350.000.000	6 Dok.	350.000.000	6 Dok.	350.000.000	6 Dok.	350.000.000		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Periode pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	-	-	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000		
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	periode pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun	175.000.000	1 Tahun	55.000.000	1 Tahun	600.000.000,00	1 Tahun	600.000.000,00	1 Tahun	620.000.000,00	1 Tahun	620.000.000,00		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	1 Paket	135.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	270.000.000	1 Paket	270.000.000		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	10 Org	40.000.000	15 Org	50.000.000	20 Org	350.000.000	20 Org	350.000.000	20 Org	350.000.000	20 Org	350.000.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	peride pelaksanaan administrasi perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun	625.000.000	1 Tahun	495.000.000	1 Tahun	1.460.000.000	1 Tahun	1.515.000.000	1 Tahun	1.515.000.000	1 Tahun	1.515.000.000		

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	35.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	65.000.000	1 Paket	65.000.000	1 Paket	65.000.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	245.000.000	3 Paket	200.000.000	3 Paket	500.000.000	3 Paket	550.000.000	3 Paket	550.000.000	3 Paket	550.000.000		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dok.	2 Dok	20.000.000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	50.000.000,00	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000,00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 Lap.	150 Lap.	300.000.000	150 Lap.	200.000.000	150 Lap.	800.000.000,00	150 Lap.	800.000.000,00	150 Lap.	800.000.000,00	150 Lap.	800.000.000,00		
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-	100%	350.000.000	100%	300.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.150.000.000	100%	850.000.000		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	-	1 Unit Kend. Rd.4	250.000.000	-	-	2 Unit Kend. Rd.4	700.000.000	2 Unit Kend. Rd.4	700.000.000	2 Unit Kend. Rd.4	700.000.000	1 Unit Kend. Rd.4	400.000.000		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	-	-	25 Unit	150.000.000	25 Unit	250.000.000	25 Unit	250.000.000	25 Unit	250.000.000	25 Unit	250.000.000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	35 Unit	100.000.000	40 Unit	150.000.000	50 Unit	200.000.000	50 Unit	200.000.000	50 Unit	200.000.000	50 Unit	200.000.000		

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Periode pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Tahun	1 Tahun	1.408.059.884	1 Tahun	3.123.966.000	1 Tahun	1.505.000.000	1 Tahun	1.505.000.000	1 Tahun	1.505.000.000	1 Tahun	1.505.000.000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Lap.	1 Lap.	20.000.000	1 Lap.	20.000.000	1 Lap.	25.000.000	1 Lap.	25.000.000	1 Lap.	25.000.000	1 Lap.	25.000.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Lap.	12 Lap.	600.000.000	12 Lap.	650.000.000	12 Lap.	700.000.000	12 Lap.	700.000.000	12 Lap.	700.000.000	12 Lap.	700.000.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 Lap.	24 Lap.	788.059.884	12 Lap.	2.453.966.000	12 Lap.	780.000.000	12 Lap.	780.000.000	12 Lap.	780.000.000	12 Lap.	780.000.000		
Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Periode pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Tahun	1 Tahun	1.040.000.000	1 Tahun	774.840.876	1 Tahun	1.700.000.000	1 Tahun	1.700.000.000	1 Tahun	1.650.000.000	1 Tahun	1.650.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapngan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	90 Unit	90 Unit	800.000.000	90 Unit	679.840.876	90 Unit	850.000.000	90 Unit	850.000.000	90 Unit	800.000.000	90 Unit	800.000.000		
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	20 Unit	50.000.000	50 Unit	45.000.000	50 Unit	100.000.000	50 Unit	100.000.000	50 Unit	100.000.000	50 Unit	100.000.000		
Pemeliharaan/reha bilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	1 Unit	190.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	750.000.000	3 Unit	750.000.000	3 Unit	750.000.000	3 Unit	750.000.000		
Program Penyediaan dan Pengembangan	Luas Pengembangan Komoditi Perkebunan (ha)	0 Ha	150	2.973.276.000	150	3.530.000.000	300 Ha	5.270.000.000	300 Ha	5.395.000.000	300 Ha	5.470.000.000	300 Ha	5.545.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri	Pengentasan Kemiskinan

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
sarana pertanian															Pangan (GSMP)	
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4 Lap.	4 lap	931.000.000	1 Lap.	2.225.000.000	2 lap.	2.000.000.000	2 lap.	2.050.000.000	2 lap.	2.050.000.000	2 lap.	2.050.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	4 Lap.	4 Lap.	931.000.000	1 Lap.	1.375.000.000	1 Lap.	350.000.000	1 Lap.	400.000.000	1 Lap.	400.000.000	1 Lap.	400.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan
Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil perkebunan	-	-	-	-	850.000.000	1 Lap.	1.650.000.000	1 Lap.	1.650.000.000	1 Lap.	1.650.000.000	1 Lap.	1.650.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Dokumen Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	3 Dak	1.909.226.000	3 Dak	1.255.000.000	3 Dak	2.920.000.000	3 Dak	2.945.000.000	3 Dak	2.970.000.000	3 Dak	2.995.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	-	4.200 Sertif.	130.000.000	4.200 sertif	150.000.000	4.200 sertif	300.000.000	4.300 sertif	300.000.000	4.400 sertif	300.000.000	4.500 sertif	300.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga.	-	1 Lap.	125.726.000	1 Lap.	30.000.000	1 Lap.	150.000.000	1 Lap.	150.000.000	1 Lap.	150.000.000	1 Lap.	150.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang	-	125.000 btg	1.653.500.000	7.500 btg	1.075.000.000	82.000	2.470.000.000	82.000	2.495.000.000	82.000	2.520.000.000	82.000	2.545.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Periode pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan provinsi	-	1 tahun	133.050.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	350.000.000	1 tahun	400.000.000	1 tahun	450.000.000	1 tahun	500.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah pelaksanaan sistem manajemen mutu SDG tumbuhan dan mikroorganisme	-	1 Lap.	133.050.000	1 Lap.	50.000.000	1 Lap.	350.000.000	1 Lap.	400.000.000	1 Lap.	450.000.000	1 Lap.	500.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan
Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian	Persentase realisasi pembangunan prasarana perkebunan	na	na	228.125.000	100	50.000.000	100	450.000.000	100	425.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<i>Penataan Prasarana Pertanian</i>	<i>Jumlah dokumen dan laporan penataan prasarana perkebunan</i>	-	<i>2 laporan</i>	<i>228.125.000</i>	<i>2 laporan</i>	<i>50.000.000</i>	<i>2 laporan</i>	<i>450.000.000</i>	<i>2 laporan</i>	<i>425.000.000</i>	<i>2 laporan</i>	<i>350.000.000</i>	<i>2 laporan</i>	<i>350.000.000</i>	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya	-	4 Lap.	28.125.000	1 Lap.	50.000.000	1 Lap.	150.000.000	1 Lap.	150.000.000	1 Lap.	150.000.000	1 Lap.	150.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya	Jumlah gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi	-	1 Unit	200.000.000	-	-	2 Unit	300.000.000	1 unit	275.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas Areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan Gangguan Usaha (Ha)	-	850	389.785.000	375 Ha	1.115.000.000	550 Ha	1.450.000.000	550 Ha	1.450.000.000	550 Ha	1.450.000.000	550 Ha	1.450.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan
<i>Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi</i>	<i>Jumlah pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan (kegiatan) provinsi</i>	-	<i>2 Kegiatan</i>	<i>389.785.000</i>	<i>2 Kegiatan</i>	<i>1.115.000.000</i>	<i>3 Kegiatan</i>	<i>1.450.000.000</i>	<i>3 Kegiatan</i>	<i>1.450.000.000</i>	<i>3 Kegiatan</i>	<i>1.450.000.000</i>	<i>3 Kegiatan</i>	<i>1.450.000.000</i>	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah luasan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	600	259.445.000	125 Ha	900.000.000	250 Ha	1.000.000.000	250 Ha	1.000.000.000	250 Ha	1.000.000.000	250 Ha	1.000.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ditangani	-	-	-	-	-	50 Ha	100.000.000	50 Ha	100.000.000	50 Ha	100.000.000	50 Ha	100.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan
Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Jumlah luasan Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	-	250 Ha	130.340.000	250 Ha	215.000.000	250	350.000.000	250	350.000.000	250	350.000.000	250	350.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha yang diawasi dan dibina	na	na	37.900.000	20	50.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rekomtek usaha perkebunan			37.900.000		50.000.000		150.000.000		150.000.000	-	150.000.000	-	150.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan

Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket.	
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembinaan dan pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	-	18 Laporan	37.900.000	20 Laporan	50.000.000	20 Laporan	150.000.000	20 Laporan	150.000.000	20 Laporan	150.000.000	20 Laporan	150.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	na	na	10.998.377.680	80	3.850.000.000	80	6.440.000.000	80	6.440.000.000	80	6.440.000.000	80	6.440.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah cakupan binaan kelompok tani (kelompok)	100 Kelompok	94 Kelompok	10.947.977.680	94 Kelompok	3.800.000.000	100 Kelompok	6.340.000.000	100 Kelompok	6.340.000.000	100 Kelompok	6.340.000.000	100 Kelompok	6.340.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	100 Kelompok	94	10.947.977.680	94 Kelompok	3.800.000.000	100 Kelompok	6.340.000.000	100 Kelompok	6.340.000.000	100 Kelompok	6.340.000.000	100 Kelompok	6.340.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Pertanian Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan pekebun yang terbentuk (kelompok)	-	1 Kelompok	50.400.000	1 Kelompok	50.000.000	1 Kelompok	100.000.000	1 Kelompok	100.000.000	1 Kelompok	100.000.000	1 Kelompok	100.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	-	1 unit	50.400.000	1 unit	50.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Pengentasan Kemiskinan

Tabel 4.3. Rincian Komponen Belanja

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)						KETERANGAN
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	3	3	3	3	3	4
I.	BELANJA OPERASI	29.216.012.094	30.189.539.564	37.231.511.798	39.256.511.798	41.331.511.798	43.631.511.798	
1.	Belanja Pegawai :	11.544.829.000	16.748.385.000	18.416.511.798	20.261.511.798	22.286.511.798	24.506.511.798	
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.811.176.405	11.846.979.000	13.024.965.198	14.530.810.538	15.983.891.592	17.582.280.751	
	1) Belanja Gaji Pokok ASN	4.646.151.996	8.500.844.000	9.350.928.400	10.608.938.032	11.669.831.835	12.836.815.019	
	2) Belanja Tunjangan Keluarga ASN	466.498.996	1.067.640.000	1.174.404.000	1.326.598.240	1.459.258.064	1.605.183.870	
	3) Belanja Tunjangan Jabatan ASN	337.438.750	320.149.000	352.163.900	415.553.402	457.108.742	502.819.616	
	4) Belanja Tunjangan Fungsional ASN	67.608.750	86.825.000	95.507.500	110.703.010	121.773.311	133.950.642	
	5) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	127.654.531	339.452.000	373.397.200	417.025.752	458.728.327	504.601.160	
	6) Belanja Tunjangan Beras ASN	265.914.310	604.979.000	665.476.900	490.294.314	539.323.745	593.256.120	
	7) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	93.731.363	194.926.000	214.418.600	245.264.140	269.790.554	296.769.609	
	8) Belanja Pembulatan Gaji ASN	66.255	297.000	326.700	378.466	416.313	457.944	
	9) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	740.261.418	607.748.000	661.811.098	761.156.328	837.271.961	920.999.157	
	10) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.436.782	20.404.000	22.444.400	25.463.944	28.010.338	30.811.372	
	11) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	34.307.254	61.209.000	67.329.900	76.388.026	84.026.829	92.429.511	
	12) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	20.106.000	42.506.000	46.756.600	53.046.884	58.351.572	64.186.730	
	b. Belanja Pegawai Lainnya ASN	4.733.652.595	4.901.406.000	5.391.546.600	5.730.701.260	6.302.620.206	6.924.231.048	
	1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.733.652.595	4.901.406.000	5.391.546.600	5.730.701.260	6.302.620.206	6.924.231.048	
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN							
	-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4.733.652.595	4.901.406.000	5.391.546.600	5.730.701.260	6.302.620.206	6.924.231.048	
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN							
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN							
2.	Belanja Barang dan Jasa	17.671.183.094	13.441.154.564	18.815.000.000	18.995.000.000	19.045.000.000	19.125.000.000	
II.	BELANJA MODAL	721.687.890	315.000.000	2.200.000.000	2.175.000.000	2.100.000.000	1.800.000.000	
	a. Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-	
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	341.687.890	315.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	850.000.000	
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	380.000.000	-	1.050.000.000	1.025.000.000	950.000.000	950.000.000	
TOTAL BELANJA (I + II + III + IV)		29.937.699.984	30.504.539.564	39.431.511.798	41.431.511.798	43.431.511.798	45.431.511.798	

Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No. (1)	Program Prioritas (2)	Outcome (3)	Kegiatan/Sub Kegiatan (4)	Ket. (5)
1.	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan	Meningkatkan kesejahteraan petani pekebun	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	
			Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
			Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
			Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Sub Kegiatan Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	
			Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Peningkatan pendapatan petani perkebunan dapat dilakukan dengan dua (2) cara:

- 1. Peningkatan harga komoditi, tanaman perkebunan yang merupakan komoditas ekspor sehingga harga komoditas sangat dipengaruhi oleh pasar internasional (ekspor), seperti komoditas karet melalui Singapore Comodity (SICOM) dan komoditas kelapa sawit di Rotterdam Belanda. Harga komoditas yang masih fluktuatif dan cenderung menurun sangatlah mempengaruhi pendapatan petani.
- 2. Peningkatan produksi, saat ini Produksi tanaman perkebunan masih jauh dari standar potensi ideal produksi tanaman perkebunan.

Pada rancangan rencana strategis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029, ada target keberhasilan yang ingin dicapai dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Target capaian tersebut dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang akan ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nilai Tukar Petani Perkebunan (NTP)	%	130,35	116	118	120	122	124	126	
Persentase peningkatan produksi Karet	%	0,46	0,109	0,110	0,111	0,112	0,113	0,114	
	Ton	1.008.362,07	1.009.461,18	1.010.571,59	1.011.693,33	1.012.826,42	1.013.970,92	1.015.126,84	
Persentase peningkatan produksi Kelapa Sawit	%	0,87	0,445	0,447	0,449	0,451	0,453	0,455	
	Ton	3.399.995,63	3.415.125,61	3.430.391,22	3.445.793,68	3.461.334,21	3.477.014,05	3.492.834,47	
Persentase peningkatan produksi Kopi	%	5,12	3,713	3,715	3,718	3,720	3,725	3,730	
	Ton	218667,51	226.786,630	235.211,760	243.956,930	253.032,130	262.457,580	272.247,240	
Persentase peningkatan produksi Kelapa	%	0,14	1,441	1,445	1,447	1,449	1,451	1,455	
	Ton	61647,2	62.535,540	63.439,170	64.357,140	65.289,670	66.237,030	67.200,780	
Evaluasi Aktif dari SAKIP	Nilai atau skor	80,72	80,75	80,80	80,85	80,90	80,95	81,00	

Potensi peningkatan produksi untuk komoditas perkebunan masih sangatlah besar. Terutama untuk komoditas-komoditas utama seperti Karet, Kelapa sawit, Kopi dan Kelapa.

Upaya untuk peningkatan Produktivitas tanaman Karet dapat dilakukan dengan kegiatan peremajaan dan pengembangan karet rakyat, pembinaan-pembinaan dalam melakukan *Good Agriculture Practices* (GAP), pengawasan peredaran benih agar benih yang beredar dan tertanam adalah

benih yang bermutu dan sesuai dengan ketentuan, membantu penanggulangan terhadap hama dan penyakit tanaman karet serta memberikan bantuan sarana produksi seperti pupuk.

Untuk produktivitas tanaman kelapa sawit dari kondisi awal tahun 2024 sebesar 3,42 ton/CPO/Tahun diharapkan menjadi 3,54 ton/CPO/tahun pada akhir tahun 2030 dapat dilakukan dengan :

1. Intensifikasi tanaman Kelapa Sawit dengan memberikan bantuan pupuk agar produksi per hektarnya dapat lebih meningkat.
2. Menjaga serta meningkatkan stabilitas Harga komoditi kelapa sawit. Penentuan harga TBS dilaksanakan setiap 2 kali setiap bulannya melalui kegiatan penetapan harga TBS. Harga yang tinggi dan stabil dapat mendorong semangat petani untuk merawat/memelihara tanaman dengan baik sehingga dapat meningkatkan produksi tanaman.
3. Untuk terus meningkatkan produksi terus dilakukan pengembangan kelapa sawit rakyat, pembinaan-pembinaan dalam melakukan Good Agriculture Practices (GAP), melakukan pengawasan peredaran benih/bibit kelapa sawit palsu, memberikan bantuan benih kelapa sawit unggul serta terus melakukan koordinasi dengan stake holder untuk pelaksanaan kegiatan revitalisasi perkebunan dalam rangka peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat.

Peningkatan luas areal dan produksi kelapa sawit selain dilakukan dengan pola swadaya serta anggaran swasta dapat juga menggunakan dana perbankan dan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh BPD PKS. Pada tahun 2017-2024 telah dilaksanakan rekomtek 73.207 Ha dan dilakukan peremajaan Kelapa Sawit pekebun seluas 53.415 Ha yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Lahat, Musi Banyuasin, dan Kabupaten Musi Rawas, menggunakan dana kelapa sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Upaya peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan kopi, maka perlu terus dilakukan :

- a. Peremajaan tanaman kopi dengan cara rejuvinasi (sambung pucuk dengan entres yang merupakan klon unggul;
- b. Penggunaan bibit kopi unggul pada penanaman baru;
- c. Melakukan intensifikasi tanaman kopi.

Meningkatkan produksi dan produktivitas kopi dapat dilaksanakan peremajaan kopi rakyat dengan cara sambung pucuk (rejuvinasi). Selain cepat menghasilkan, peremajaan sambung pucuk juga dapat meningkatkan

produksi kopi hampir 2 (dua) kali lipat dari tanaman kopi biasa. Selain itu masih banyak banyaknya tanaman kopi rakyat yang sudah mengalami fase tua/ rusak (18.702 Ha), kondisi yang tidak terawat dengan baik sehingga produksinya menjadi tidak maksimal. Untuk itu perkebunan Kopi perlu perhatian lebih agar kedepan lebih fokus dalam pembuatan kebun induk/entres yang nanti bisa digunakan untuk peremajaan serta terus melakukan intensifikasi (pemberian pupuk dsb) agar produksi dan produktivitas dapat ditingkatkan.

Upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan kelapa perlu terus dilakukan dengan memberikan :

- a) Bantuan bibit kelapa yang unggul
- b) Pengalokasian pupuk bersubsidi yang lebih besar untuk perawatan/ pemeliharaan pada komoditi kelapa tersebut.

Permasalahan dalam perkebunan Kelapa Sawit, seperti masih banyak tanaman kelapa yang sudah tua sedangkan belum adanya Blok Penghasil Tinggi (BPT) yang bisa dijadikan kebun induk penghasil benih kelapa sangatlah menghambat untuk peremajaan tanaman kelapa. Selain itu, tanaman kelapa banyak yang hanya merupakan tanaman perkarangan sehingga kurang dalam perawatan yang mengakibatkan produksinya tidak begitu optimal. Peningkatan produksi dapat terus dilakukan dengan memberikan bantuan pupuk serta melakukan peremajaan kelapa yang telah tua diharapkan dapat meningkatkan produksi mendatang.

Selain dari itu, terus melakukan pembinaan-pembinaan dalam melakukan *Good Agriculture Practices* (GAP) serta memberikan bantuan saprodi seperti pupuk untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kelapa.

4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah sub sektor Perkebunan tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci secara lengkap akan ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2030

Indikator		Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Peningkatan Jumlah Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perkebunan yang terfasilitasi Sarana dan Prasarana Perkebunan	%	-	68,00	68,20	68,40	68,60	68,80	69,00	
2	Luas Pengembangan Tanaman Unggulan Perkebunan melalui Intensifikasi, ekstensifikasi, Rehabilitasi dan Peremajaan untuk Meningkatkan Produksi dan Produktivitas	Ha	-	900	950	1.000	1.050	1.100	1.150	
3	Persentase Peningkatan Kualitas dan Perluasan Jaringan Pemasaran Produk Perkebunan	%	-	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	
4	Persentase Pelaku Usaha dan kelembagaan Petani yang Dibina	%	0,87	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	
5	Jumlah benih Unggul yang beredar	Benih	19.000.000	19.200.000	19.400.000	19.600.000	19.800.000	19.900.000	20.000.000	
6	Persentase Areal yang Tertanggulangi dari Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	%	50	52	55	58	60	63	65	
7	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V PENUTUP

Pembangunan bidang perkebunan di Sumatera Selatan memegang peranan penting dalam pembangunan regional dan nasional. Baik sebagai sumber pendapatan masyarakat, penyerap kesempatan kerja, sumber devisa bagi peningkatan perekonomian daerah maupun pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Dalam pelaksanaan pembangunan sub sektor perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, selain harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, partisipatif, transparan, akuntabel dan berbasis kinerja, juga harus mengarusutamakan agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025 - 2029, yaitu

1. Gender dan Inklusi Sosial

Dalam sub sektor perkebunan sangat penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan serta kesempatan bagi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai aspek usaha perkebunan.

2. Pembangunan Berkelanjutan

Sub sektor perkebunan diharapkan dapat terus memberikan kontribusi ekonomi yang besar sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

3. Transformasi Digital

Merupakan penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan berkelanjutan dalam pembangunan perkebunan.

4. Pembangunan Rendah Karbon

Pada sub sektor perkebunan fokus pada pengolahan lahan yang efisien dan ramah lingkungan, penggunaan pupuk organik sebagai pengganti pupuk kimia untuk mengurangi emisi, optimalisasi proses produksi, pemanenan dan pengangkutan hasil yang juga diarahkan untuk meminimalisir emisi karbon.

5. Pembangunan Berketahanan Iklim

Difokuskan pada pengolahan lahan, varietas yang tahan iklim ekstrem dan teknologi pertanian yang presisi untuk mengantisipasi perubahan pola cuaca yang dapat mengganggu produktivitas tanaman perkebunan

Mengingat pentingnya peranan perkebunan tersebut, maka melalui Rancangan Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Kegiatan, kita membangun perkebunan kedepan dengan

semangat kerjasama yang kokoh antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sehingga harapan kita untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Mudah – mudahan usaha kita akan selalu mendapat Berkah dan Ridho dari **ALLAH SWT. *Amiin Ya robbal Allamiin.***

Tim Penyusun Rancangan Renstra